

# LAPORAN

## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/ komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LAKIP ini adalah:

1. Maksud penyusunan LAKIP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:
  - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
  - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
  - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  - d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
  - f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP

- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Pematang Siantar dengan melalui perbaikan penerapan fungsi- fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya sebagai evaluasi untuk pembangunan Kota Pematang Siantar menjadi kota yang lebih mantap, maju dan jaya.

Pematang Siantar,       Maret 2024

  
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan  
Kota Pematang Siantar  
**RAMZAH RANSHURI DAMANIK, S.STP**  
PENYUSUN  
NIP. 198410242004121001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI
- 1.2 ASPEK STRATEGI ORGANISASI
- 1.3 PERMASALAHAN UMUM (ISU STRATEGI)

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA
- 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 2.3 RENSTRA (JIKA INDIKATOR KINERJA ADA YANG TIDAK MASUK DALAM IKU)

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  - 3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI
  - 3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
  - 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGI NASIONAL

- 3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)
- 3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
- 3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA
- 3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
- 3.2 REALISASI ANGGARAN

#### **BAB IV. PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Indikator Kinerja Utama
- 3. DII yang dianggap perlu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 PENJELASAN UMUM ORGNISASI

#### Kondisi Geografis Kota PematangSiantar

Kota Pematangsiantar adalah salah satu daerah kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Lokasi dan Keadaan Geografis Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2o 53' 20" - 3 o 01' 00" Lintang Utara dan 99o 1' 00" - 99o 6' 35" Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 Km2 terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22.723 km2 atau sama dengan 28,41 persen dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar.

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kota Pematangsiantar tergolong ke dalam daerah tropis dan daerah datar beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,3oC dan suhu minimum rata-rata 21,1oC. Kelembaban udara rata-rata 84 persen. Rata-rata tertinggi pada bulan Oktober dan Desember masing-masing mencapai 88 persen, sedangkan curah hujan rata-rata 229 mm di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 341 mm.

Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Siantar Martoba, Siantar Marhat, Siantar Timur, Siantar Selatan, Siantar Utara, Siantar Barat, Siantar Sitalasari, dan Siantar Marimbun. Sehingga jumlah kelurahan pada Pematangsiantar sebanyak 53 kelurahan. Kota Pematangsiantar memiliki 8 Kecamatan dimana Kecamatan Siantar Sitalasari merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 22.723 km2 dan Kecamatan Siantar Selatan merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 2,02 km2.



Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah, maka perlu dilakukan perubahan/pembentukan perangkat daerah di Kota Pematang Siantar.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yaitu:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
2. Penyusunan rencana strategis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kearsipan dan perpustakaan;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kearsipan dan perpustakaan;
7. Pelaksanaan urusan kesekretariatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
8. Pelaksanaan pembinaan masyarakat kearsipan dan perpustakaan;
9. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kearsipan dan perpustakaan di lingkungan pemerintah kota PematangSiantar;
10. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip dan koleksi daerah dan nasional;
11. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## 1.2 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Jumlah Pegawai Keseluruhan ASN dan THL:

No	Jabatan/Tugas	Seharusnya	Ada	Kurang	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	1	1	-	-
2	Sekretaris	1	1	-	-
3	Kepala Bidang	3	3	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-
5	JFT	15	10	4	-
6	Jabatan Pelaksana	40	12	21	-
7	Tenaga Harian Lepas	15	4	11	-
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>-</b>

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pengelolaan, Pelayanan, dan Pengembangan Kearsipan;
  - d. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - e. Bidang Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Pelaksana
- (2) Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Bidang Pengelolaan, Pelayanan, dan Pengembangan Kearsipan terdiri dari:
  - a. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan; dan
  - c. Seksi Pelayanan dan Pengawasan Arsip;
- (4) Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan
  - c. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;



- (5) Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
  - c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar Hukum OPD: Pembentukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, dengan mendasari kepada :

1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
6. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang – undang Nomor 43 Tahun 43 tentang Kearsipan

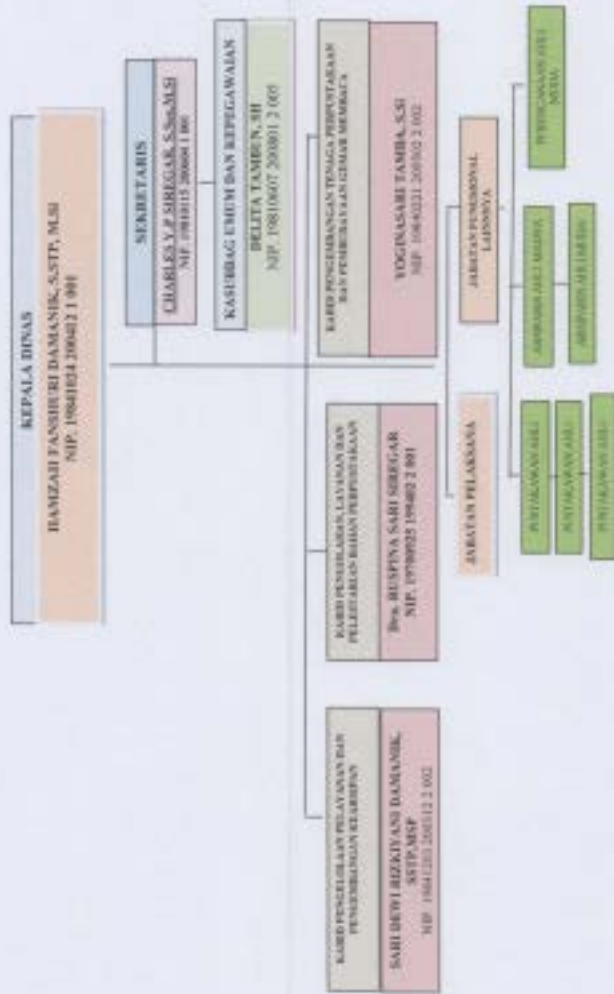
8. Peraturan Pemerintah RI No. 3030 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.
10. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kota

Pematang

Siantar

## DINAS ARSEP DAN PERPUSTAKAAN PEMATANGSIANTAR



## 1.3 PERMASALAHAN UMUM (ISU STRATEGI)

Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar terdiri dari 28 ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 4 Non ASN (Tenaga Harian Lepas), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	2	3	4
A	Jumlah Aparatur Sipil Negara/Non ASN		
	a. Aparatur Sipil Negara	28	
	b. Non ASN	4	
B	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan		
	a. S-2, S-3	8	
	b. S-1	10	
	c. D-III	2	
	d. SMU	7	
	e. SLTP	-	
	f. SD	-	
C	Jumlah Pegawai dirinci menurut golongan		
	a. Golongan IV	8	
	b. Golongan III	13	
	c. Golongan II	7	
	d. Golongan I	-	
D	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	Telah Terisi	Belum Terisi
1	Kepala Dinas	√	
2	Sekretaris	√	
3	Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	√	
4	Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	√	
5	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	√	
6	Perencana Ahli Muda	√	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	√	
8	Asisiparis Ahli Madya	√	
9	Asisiparis Ahli Muda	√	
10	Pustakawan Ahli Madya	√	
11	Pustakawan Ahli Muda	√	

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar di antaranya :

1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal.
2. Keanekaragaman Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan perpustakaan kelurahan dan kecamatan belum optimal.
4. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Layanan perpustakaan baru sebagian kecil saja menjangkau keseluruhan wilayah Kota Pematang Siantar.
6. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan Kearsipan belum memadai

Menanggapi Isu tersebut maka tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapinya adalah:

1. Meningkatkan pelayanan perpustakaan sehingga dapat meningkatnya budaya baca masyarakat.
2. Menambah koleksi bahan pustaka pada bagian arsip dan perpustakaan.
3. Meningkatkan pertumbuhan perpustakaan di kecamatan dan kelurahan.

4. Meningkatkan kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Menambah layanan perpustakaan hingga mencakup seluruh wilayah Kota PematangSiantar.
6. Menambah jumlah serta kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Berdasarkan hasil Review berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar Tahun 2024:

**Perjanjian Kinerja  
Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Dan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Memperkuat Budaya Literasi	1. Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	80%
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		4. Akreditasi Perpustakaan	B
		5. Inovasi	5 Naskah
		6. Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar Yang diidentifikasi	1 FILM
2	Meningkatnya Kepatuhan OPD Terhadap Kebijakan Kearsipan	1. Nilai AKIP	B
		2. Jumlah OPD yang ditata dan dikelola kearsipannya	CC

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	447,048,775.00	DAU
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,314,620,507.00	DAU
3.	Program Pengelolaan Arsip	161,918,879.00	DAU
	<b>Total</b>	<b>4,923,588,161.00</b>	<b>DAU</b>

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota PematangSiantar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota PematangSiantar.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2022 - 2027**

No	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target					Kondisi Akhir Tahun
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Terwujudnya perpustakaan sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase	25%	30 %	60%	63 %	67%	70 %	70 %
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persentase	45 %	50 %	62 %	64 %	66 %	68 %	68 %

No	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target					Kondisi Akhir Tahun
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Pengunjung Perpustakaan	Orang	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620	51.051	51.051
		Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Lembaga Pemerintah/ Swasta	Perpustakaan	330	335	340	345	350	360	360
		Pustakawan/ Pengelola Perpustakaan yang terlatih	Orang	173	250	325	400	475	550	550
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persentase	30,50%	32,200	34,551	37,271	40,321	43,772	43,772
2	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Naskah Kuno yang terdapat / terdistribusi	Eksemplar	5	5	5	5	5	5	30
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan	Eksemplar	675	875	1100	1350	1625	1925	1925
3.	Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap kebijakan keuangan	Persentase OPD dengan pengeluaran arsip yang baik	Persentase	34 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	90 %
		Jumlah OPD yang dinilai dan terakreditasi kearsifannya	OPD	2	4	6	7	8	8	8
		Jumlah arsip yang dinilai dan dimusnahkan	Arsip	420	440	460	480	500	500	500

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2027 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

Dalam laporan ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2027

maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Pematang Siantar. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2023-2027, telah ditetapkan 2 sasaran dengan 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

### 3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60%	95,52%
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62	89,82%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,84
4.	Akreditasi Perpustakaan	B	-
5.	Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar yang diidentifikasi	5 Naskah	10 Naskah
6.	INOVASI	1 FILM	1 FILM
7.	Nilai AKIP	B	B
8.	Jumlah OPD yang ditata dan terkelola kearsipannya	CC	CC

Melihat pada tabel diatas ada satu capaian indikator yang belum dapat diberitahukan pencapaiannya, adapun indikator tersebut ialah realisasi serta capaian kinerja pada indikator Akreditasi Perpustakaan karena masih dalam proses penilaian oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.



**3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	30%	51,86%	56,66%	0
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	50%	66,43%	45%	0
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	0
4.	Akreditasi Perpustakaan	0	0	0	0
5.	Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar yang diidentifikasi	5 NASKAH	0	6 NASKAH	0
6.	INOVASI	0	0	0	0
7.	Nilai AKIP	0	0	0	0
8.	Jumlah OPD yang ditata dan dikelola kearsipannya	4 OPD	9 OPD	0	7 OPD

**3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGI NASIONAL.**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60%	95,52%	63%	67%	70%
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62	89,82%	64%	66%	68%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,84	82%	84%	86%
4.	Akreditasi Perpustakaan	B	-	B	B	B
5.	Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar yang diidentifikasi	5 Naskah	10 Naskah	5 NASKAH	5 NASKAH	5 NASKAH
6.	INOVASI	1 FILM	1 FILM	1 INOVASI	1 INOVASI	1 INOVASI
7.	Nilai AKIP	B	B	B	B	B
8.	Jumlah OPD yang ditata dan dikelola kearsipannya	CC	CC	B	B	B

### 3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar Tidak ada

### 3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Faktor Penyebab Keberhasilan Kegiatan:

- a. Perpustakaan sebagai media pembelajaran dan pusat informasi belum dapat menyentuh keseluruhan masyarakat.
- b. Rendahnya pengelolaan Otomasi dan *Digital Library*.
- c. Kurangnya pengelolaan pustaka dan naskah kuno.
- d. Belum optimalnya Penyelamatan/Pelestarian dokumen arsip daerah.
- e. Minimnya arsiparis yang ada di Kota Pematangsiantar

Solusi yang telah dilakukan :

- a. Melengkapi sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan yang berkualitas.
- b. Memperbanyak pendidikan dan latihan kepada pegawai dalam bidang kearsipan dan perpustakaan.
- c. Meningkatkan pengelolaan pustaka dan naskah kuno.
- d. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pegawai di dalam maupun di luar lingkungan perangkat daerah melalui rapat-rapat dan komunikasi yang baik dan lancar.
- e. Meningkatkan Pengelolaan Arsiparis

## 3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

N C	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGA- RAN	REALI- SASI	CAP- AIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Memperkuat Budaya Literasi		Program Pembinaan Perpustakaan	447,04 8,775	388,57 3,526	98,87 %
		Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	98,432 ,698	97,872 ,760	99,43 %
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48,062 ,342	44,941 ,010	93,51 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengembangan Bahan Perpustakaan			
		Akreditasi Perpustakaan				
		Inovasi				
		Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar Yang diidentifikasi	0	0	0	
II	Meningkatnya Kepatuhan OPD Terhadap Kebijakan	Nilai AKIP	Program Penunjangannya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	4,314, 620.50 7	4,019, 683,81 1	93,51 %

Kearsipan	Kota			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,196,421	2,708,650	84,74 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,286,681,152	3,032,472,475	92,26 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125,714,000	123,110,000	97,93 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,456,205	747,030	51,30 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Kantor	16,744,570	15,956,900	95,29 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121,019,395	110,367,180	91,20 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,495,925	12,631,360	93,59 %
	Penyediaan Bahan	6,155,640	6,090,300	98,94 %

		Logistik Kantor			
		Penyelenggaraan Barang Cetakan dan Penggadaan	15,599,749	11,689,000	74,93 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157,401,000	157,179,851	99,88 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,680,200	86,571,365	90,48 %
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelelangan Kantor	12,026,250	11,867,000	98,67 %
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232,520,000	231,670,000	99,63 %
	Jumlah OPD yang ditata dan terkelola kearsipannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,940,000	59,790,722	89,32



		Penyediana an Jasa Pemeliharaa an, Biaya Pemeliharaa an dan Pajak Kendaraan Operasional Atau Lapangan	81,740 ,000	78,881 ,978	96,50
		Pemeliharaa an/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	57,250 ,000	56,950 ,000	99,47 %
Jumlah OPD yang ditata dan terkelola kearsipannya		Program Pengolahan Arsip	161,91 8,879	158,07 0,720	97,62 %
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/K ota	50,798 ,738	49,266 ,000	96,98 %
		Pemberdaya an Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	111,12 0,141	108,80 4,720	97,92 %
		TOTAL.....	4,923, 588,16 1	4,619, 750,44 5	93,83 %

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

N O	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Dan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Memperkuat Budaya Literasi	Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60 %	95,52 %	159,2 %	146,4 95,04 0	142,8 13,77 0	97,4 9%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62	89,82 %	144,8 %	300,5 53,73 0	299,1 82,14	99,5 4%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,84	101,5	300,5 53,73 0	299,1 82,14 4	99,5 4 %
		Akreditasi Perpustakaan	B	-	-	-	-	-
II	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar yang diidentifikasi	5 Naskah	10 Naskah	200 %	0	0	0
		INOVASI	1 FILM	1 FILM	100 %	300,5 53,73 0	299,1 82,14 4	99,5 4 %
III	Meningkatkan	Nilai AKIP	B	B	100	4,31	4,019,	93,5

ya				%	4,62	683,8	1 %
Kepatuhan OPD					05	11	
Terhadap- Kebijakan Kearsipan	Jumlah OPD yang dilata dan terkelola kearsipannya	CC	CC	100 %	151, 918, 879	158,0 70,72 0	97,6 2%

Tabel Efisiensi Per Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA%	CAPAIAN ANGGA RAN%	EFISI ENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Dan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Memperkuat Budaya Literasi	Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	159,2 %	97,49 %	61,71 %
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	144,8 %	99,54 %	45,26 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	101,5	99,54 %	1,96%
		Akreditasi Perpustakaan	-	-	-
II	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Naskah Kuno di Kota Pematangsiantar yang diidentifikasi	200 %	0	200%
		INOVASI	100 %	99,54 %	0,46 %
III	Meningkatnya Kepatuhan OPD Terhadap-	NILAI AKIP	100 %	93,51 %	6,49 %

Kebijakan Kearsipan				
	Jumlah OPD yang ditata dan terkelola kearsipannya	100 %	97,62 %	2,38 %

Capaian Kinerja : Realisasi Indikator/Target x 100%

Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan/Pagu APBD tahun 2024

Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja-Penyerapan Anggaran

Melihat pada tabel diatas ada satu capaian indikator yang belum dapat diberitahukan pencapaiannya, adapun indikator tersebut ialah realisasi serta capaian kinerja pada indikator Akreditasi Perpustakaan karena masih dalam proses penilaian oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

### 3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 8 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027, analisis pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

#### L. Peningkatan Minat Baca Masyarakat

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar telah berbenah untuk memberikan pelayanan perpustakaan melalui sistem pengelolaan perpustakaan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, hal itu terlihat dengan difungsikannya fasilitas server perpustakaan yang terintegrasi melalui jaringan, untuk itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan penginputan data koleksi buku perpustakaan ke dalam aplikasi perpustakaan inisite yang terlaksana dalam kegiatan Penataan buku dari manual menjadi sistem komputerisasi (online) dan Perpustakaan juga telah memiliki Layanan Perpustakaan Elektronik (E-Book) sebanyak 638 Eksemplar.

Untuk saat ini pelayanan pendaftaran anggota perpustakaan dapat langsung berfoto dan mengisi formulir pendaftaran di tempat dan pengisian buku tamu dan

pencarian buku dapat dilakukan melalui komputer berbasis aplikasi perpustakaan inisite dan kartu anggota bisa langsung dicetak menggunakan printer kartu, begitu juga dengan peminjaman dan pengembalian buku sekarang telah menggunakan jaringan otomasi perpustakaan inisite dengan telah terlaksananya kegiatan Pengembangan otomasi perpustakaan.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum untuk Tahun 2024 target 48.305 orang pengunjung dan terealisasi 60.242 orang ( 130,10 % ).

II. Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan mengadakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah yang ditampilkan di dalam program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebesar Rp. 157,401,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 157,179,851,- (99,86 %).

III. Kegiatan Operasional Rutin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi kegiatan harian yang dilaksanakan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kegiatan surat menyurat, kegiatan harian pada masing-masing bidang dan kegiatan lain yang menunjang terlaksananya operasional Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kegiatan operasional secara penuh dilaksanakan setiap hari senin s/d kamis Pukul 7.45 WIB – 16.00 WIB, sedangkan hari jumat Pukul 7.45 WIB – 16.30 WIB dan pada hari sabtu Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 Wib, sedangkan di luar jam tersebut, dan pada hari minggu dan hari libur nasional Dinas Arsip dan Perpustakaan tutup.

## 3.2 Realisasi Anggaran

## Penyerapan Dana Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	447,048,775	388,573,526	86,87 %	DAU
	Pengembangan Bahan Pustaka	300,553,730	289,182,144	96,24 %	DAU
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,432,698	97,872,760	99,43 %	DAU
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48,062,347	44,941,010	93,51 %	DAU
II	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	4,314,620,507	4,019,683,811	93,16 %	DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,196,421	2,708,650	84,74 %	DAU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,286,881,152	3,032,472,475	92,26 %	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125,714,000	123,110,000	97,93 %	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,456,205	747,030	51,30 %	DAU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,744,570	15,666,900	93,59 %	DAU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121,019,395	110,367,180	91,20 %	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,495,925	12,631,360	93,59 %	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,155,640	6,090,300	98,94 %	DAU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,599,749	11,689,000	74,93 %	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	157,401,000	157,179,851	99,86 %	DAU



III	dan Konsultasi SKPD				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21,000,000	21,000,000	100 %	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,680,200	86,571,365	90,48 %	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,026,250	11,867,000	98,67 %	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232,520,000	231,670,000	99,63 %	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,940,000	59,790,722	89,32 %	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	81,740,000	78,881,978	96,50 %	DAU
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	57,250,000	56,850,000	99,47 %	DAU
	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	161,918,879	158,070,720	97,62 %	DAU
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	50,798,738	49,286,000	96,98 %	DAU
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	111,120,141	108,804,720	97,92 %	DAU
	<b>TOTAL.....</b>	<b>4,923,588,161</b>	<b>4,619,750,445</b>	<b>93,83 %</b>	<b>DAU</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar ini, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sistematika Penyusunannya ddasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 'Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program-Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar guna mencapai sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan, yaitu:

- 1) Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
- 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa/pelajar dalam menciptakan karya Tulis Ilmiah
- 3) Pengadaan sumber informasi (buku, majalah, koran, jurnal ilmiah) yang lengkap dan beragam
- 4) Tersedianya arsip di unit-unit kerja dan tersedianya aparatur yang handal di bidang kearsipan
- 5) Meningkatnya kualitas aparatur/pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematang Siantar
- 6) Tersedianya sistem sirkulasi buku dan informasi yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi

- 7) Akses informasi yang cepat dan beragam
- 8) Mengembangkan manfaat Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Kelurahan/Kecamatan, SKPD dan Perpustakaan khusus sebagai pusat informasi
- 9) Terjalannya koordinasi kerja dan evaluasi di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi sedangkan secara keseluruhan.

#### **B. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja**

Dalam usaha untuk mencapai pencapaian kinerja, ditemukan Kendala dan Hambatan yang dialami oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, kurangnya tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis, rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi.
2. Kurangnya Pemahaman personil di Dinas Arsip dan Perpustakaan tentang Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja

#### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi untuk mencapai Pencapaian Kinerja adalah dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang, mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. Berikut adalah strategi yang diambil dari Dinas Arsip dan Perpustakaan:

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Meningkatkan Kompetensi SDM untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi.
3. Mengoptimalkan kompetensi SDM, pemanfaatan data, arsip-arsip nasional dan pelayanan

#### **D. Langkah – langkah Ke Depan Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LAKIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Pematang Siantar khususnya Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam melakukan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Kota Pematang Siantar dalam rangka mencapai sasaran visi Pemerintah Kota Pematang Siantar yaitu "Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas".

Langkah – langkah kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah :

- 1) Melibatkan semua aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar untuk mengoptimalkan potensinya bekerja keras, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Memahamkan kepada seluruh aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar bahwa substansi Program Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- 3) Mengajak seluruh Pemangku Kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar;


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Walikota Pematang Siantar telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimanatkan Perda.
3. Ukuran sasaran yang ditetapkan, telah dilaksanakan namun belum dapat diwujudkan secara optimal.
4. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut, yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan akan melakukan evaluasi atas setiap perubahan kondisi.

Mengetahui,

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan  
Kota Batam, 12 Januari 2011

  
KUMZAH FANSHURI DAMANIK, S.STP  
Pembina TK.I  
NIP. 198410242004121001